

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Amrullah, M. Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2014).
- Anggono, Bayu Dwi, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014)
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Bakhri, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Praktik Peradilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Baridwan, Zaki, Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, (Yogyakarta : BPPE, 2010)
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007)
- Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Friedman, Lawrence M., The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Huleman, H. C., Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, (Jakarta : C.V. Rajawali, 1984)
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Kansil, C.S.T, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009)

- Koto, Zulkarnaen, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, (STIK, Jakarta, 2011)
- Loqban, Loeby, Pra Peradilan di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987)
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007)
- Ngani, Nico, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Prakoso, Abintoro, Hukum dan Psikologi Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014)
- Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2015)
- Radbruch, Gustav Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1983)
- _____, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- _____, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Sendo Adji, Indriyanto, Korupsi dan Hukum Pidana (Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011)

- Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013)
- Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Utrecht, E., Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1959)
- Wilson, O.W., Police Administration, (New York: Mc. Grow Hull Book Company, 1960)
- Wisnubroto, Ali, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), (Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega, 2002)
- Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Zainal, Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

JURNAL DAN ARTIKEL

- Husein, Yunus, “Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar Nccts: Kerja Keras Yang Berkelanjutan”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebaksentralan, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005
- Lasmadi, Sahuri, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Almendo, Meldy Ance, “Prinsip Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, (Tesis pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, 2008)
- Purnamasari, Dyah Putri, Analisis Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata, (Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, 2013).

Wantu, Fence. M., Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, (Disertasi pada Program Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236)

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849)

PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 terkait Putusan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 terkait Putusan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 2023.

WEBSITE/INTERNET

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 13.50 WIB.

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.50 WIB.

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 14.45 WIB.

<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/selayang-pandang>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.

WAWANCARA

Muslim Tendri, Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara Pribadi, Mei 20, 2024.